



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

**Implementasi Program Bantuan  
Operasional Sekolah di Sekolah Mengah  
Pertama Negeri 3 Semarang**

**Sherli Marintan Marpaung**

**Mahasiswa Program Studi S1 Administrasi  
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik**

**Universitas Diponegoro**

***ABSTRACT***

Education is one of the most important aspect in human lives that helps making and improving a better life as a nation. Education is also a way to prepared students for their role in the future through guidance, teaching and training.

The government has he main role in fulfilling the needs of education in society. The government has made a policy in educational field that is School Operational Assistance program. School Operational Assistance program has made to support 9-year compulsory education program. The government provides funds to schools so that students are exempt from all tuition fees. This

program was started in July 2005 along with the beginning of 2005/2006 academic year.

This research was conducted in SMP N 3 Semarang which is one of the best school in Semarang. This research is based on the reality of the implementation that there are several problems such as the limited use of School Operational assistance funds for schools as implementers. Based on the research, the implementation of School Operational Assistance program in SMP N 3 Semarang is still not optimal. Therefore the recommendation is by not limiting the use of School Operational Assistance funds for every schools, funding school based on the needs of each schools, and understanding the use of School Operational Assistance funds to avoid misperception in the implementation.

***Keywords: Education, Implementation, School Operational Assistance Program***

**1. Pendahuluan**

Pendidikan adalah aspek yang selalu harus ada dalam kehidupan manusia yang dapat membangun sebuah kehidupan dalam berbangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu usaha untuk



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Pemerintah telah membuat program guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD / MI / SDLB dan SMP / MTs / SMPLB negeri / swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sebagaimana ditulis dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah ini peserta didik di tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah atau dengan kata lain tidak dipungut biaya.

Kota Semarang sendiri sudah

mulai melaksanakan program BOS sejak tahun 2006 yang diterima untuk satu semester yaitu bulan Juli-Desember. Terhitung tahun 2015, Sekolah Dasar dengan jumlah 511 sekolah dan 139.050 siswa mendapatkan total 27.810.000.000.

Untuk Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah 187 sekolah dan 65.399 siswa mendapatkan 16.349.750.000. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama disalurkan ke rekening sekolah masing-masing.

Untuk melakukan penelitian mengenai BOS di Kota Semarang, lokus penelitian bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semarang. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Semarang karena SMP Negeri 3 Semarang merupakan salah satu sekolah unggulan dan terbaik di Kota Semarang. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah dalam



pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah ini dapat berjalan dengan baik atau masih terkendala oleh berbagai faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.

Dalam implementasi program ini hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa jauh program tersebut tepat sasaran dan juga manfaat serta tujuan program BOS. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semarang”.

## **2. Metode Penelitian dan Teori**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif dan jenis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta

fenomena- fenomena menurut pandangan dan definisi partisipan. Penelitian metode kualitatif dan jenis deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Situs penelitian menetapkan tempat atau wilayah di mana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi atau wilayah yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang dan SMP Negeri 3 Semarang. Dalam penelitian ini penulis menunjuk informan utama yaitu Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah di Dinas Pendidikan Kota Semarang yang mengetahui dan memiliki data yang dibutuhkan oleh penulis. Selanjutnya, penulis memilih Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Semarang. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Semarang nantinya



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

akan menunjukkan ke bagian mana penulis akan mendapatkan data yang lebih lengkap. Setelah data yang diperoleh sudah mencukupi maka data tersebut kemudian akan dianalisis. Dengan kata lain informan kunci pertama (*first key informan*) yang dipilih adalah Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah di Dinas Pendidikan Kota Semarang dan informan kunci kedua (*second key informan*) adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi, dan sebagai narasumber adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kepala Sekolah dan Bendahara SMP Negeri 3 Semarang.

Teori pendekatan implementasi menurut George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Ada empat isu pokok agar implementasi

kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi berkenaan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan, sikap dan respon yang tanggap dari pihak yang terlibat. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk membawa (*carry out*) kebijakan publik tersebut. Dan struktur birokrasi berkenaan dengan berjalannya rantai komando sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Berdasarkan pendekatan Model George C. Edwards, maka penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji empat faktor dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya dan



disposisi pada implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semarang. Dari empat faktor tersebut nantinya akan ditemukan berbagai gejala yang mempengaruhi proses Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semarang yang selanjutnya gejala-gejala tersebut akan dikaji dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahannya.

### **3. Hasil Penelitian**

Alur pencairan dana BOS di SMP Negeri 3 Semarang adalah melalui pusat yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang yang kemudian ditransfer ke rekening khusus BOS SMP Negeri 3 Semarang. Dana BOS dikeluarkan selama empat kali dalam setahun, yaitu diberikan pada tiap triwulan. Triwulan pertama adalah untuk bulan Januari – Maret, triwulan kedua

adalah untuk bulan April – Juni, triwulan ketiga adalah untuk bulan Juli – September, dan triwulan keempat adalah untuk bulan Oktober - November.

Sepanjang tahun 2016, SMP Negeri 3 Semarang total memperoleh dana BOS sebanyak Rp. 504.810.000,00. Dana tersebut dialokasikan ke dalam berbagai urusan dan kebutuhan operasional sekolah, diantaranya adalah sebanyak Rp.96.760.000,00 untuk pengeluaran pegawai, Rp.330.750.235,00 untuk belanja barang dan jasa, serta Rp 13.512.179,00 untuk belanja modal sekolah. Pada tahun 2016, jumlah peserta didik di SMP Negeri 3 Semarang adalah sebanyak 683 siswa, di mana besaran dana BOS yang diberikan per siswa adalah sebanyak Rp. 1.000.000,00 per tahun.

Berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban, SMP Negeri 3 Semarang telah melaksanakan sesuai



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

dengan aturan, yaitu menyerahkan laporan pengelolaan dana pada tiap akhir triwulan dalam satu tahun. Laporan tersebut ada yang bersifat dokumen dan ada yang dilakukan secara online.

Dalam pelaksanaan BOS terjalin komunikasi yang baik di antara pihak Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah dengan orang tua atau wali murid SMP Negeri 3 Semarang. Komunikasi tersebut dapat dilihat dari adanya sosialisasi yang membahas apa itu program BOS, besaran dana yang diberikan, serta penggunaan dana yang diterima oleh pihak sekolah. Diketahui bahwa SMP Negeri 3 Semarang secara rutin mengadakan sosialisasi pada orang tua atau wali murid pada tiap tahun ajaran baru. Sosialisasi juga dilakukan antara Dinas Kota Semarang dan SMP Negeri 3 Semarang yang telah rutin dilakukan dua kali pada tiap tahunnya. Arahan dan sosialisasi tersebut pada

dasarnya dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program BOS pada tahun sebelumnya serta membahas mengenai JUKNIS BOS untuk tahun selanjutnya untuk kemudian dipelajari oleh Tim Manajemen BOS pada tingkat sekolah.

Kemudian pengelolaan dana BOS berkaitan erat dengan transparansi serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Tiap sekolah penerima dana BOS diwajibkan untuk membentuk Tim Manajemen BOS tingkat sekolah sebagai pihak-pihak yang diberikan mandat serta tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola dana yang diberikan untuk akhirnya dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pihak SMP Negeri 3 Semarang dinilai telah transparan mengenai penerimaan serta penggunaan dana BOS. Hal ini dapat dilihat dari adanya papan pengumuman yang berisi penerimaan dana



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

BOS pada tiap triwulan selama satu tahun, serta pengeluaran dana BOS pada tiap triwulan selama satu tahun. Papan pengumuman tersebut dipasang di bagian depan sekolah dekat dengan ruang guru sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh siswa maupun oleh orang tua atau wali murid SMP Negeri 3 Semarang.

Dalam pelaksanaannya, SMP Negeri 3 Semarang dinilai telah mampu melaksanakan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari bahwa SMP Negeri 3 Semarang sudah tidak lagi mengadakan penarikan iuran atau pungutan untuk biaya operasional sekolah dalam bentuk apapun. Walaupun demikian, SMP Negeri 3 Semarang masih menerima sumbangan secara sukarela dari orang tua murid. Sumbangan tersebut masih diperbolehkan dengan syarat bersifat tidak mengikat, tidak ditentukan besarnya, serta tidak

ada tenggat waktu dalam pemberiannya. Sumbangan secara sukarela ini biasanya diberikan oleh orang tua pada tiap tahun ajaran baru, yang diserahkan langsung kepada pegawai Tata Usaha SMP Negeri 3 Semarang.

Kemudian sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam hal implementasi suatu program. Tanpa adanya sumber daya yang sesuai dan berkompeten di bidangnya, maka sebagus apapun kebijakan disusun, maka tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya yang dinilai paling sesuai dengan tujuan kebijakan untuk dapat bertindak sebagai implementor kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan Program BOS di tingkat sekolah, sumber daya manusia yang bertindak sebagai implementor adalah Tim Manajemen BOS di tingkat





DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

sekolah, yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Bendahara. Implementor harus mempunyai kapabilitas yang mampu untuk menjalankan dan mengelola program BOS pada tingkat sekolah. Agar Tim Manajemen BOS memiliki pengetahuan serta keterampilan yang baik, maka dibutuhkan arahan dari pihak Dinas Pendidikan Kota yang dilakukan melalui sosialisasi. Dinas Pendidikan Kota Semarang sendiri diketahui sudah melaksanakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah penerima Dana BOS di Kota Semarang.

Sumber daya finansial juga merupakan masukan yang sangat mempengaruhi implementasi suatu program atau kebijakan. Hal ini dikarenakan bahwa, tiap apapun yang dilakukan pemerintah terutama dalam rangka menjalankan suatu kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada

masyarakat, tentu membutuhkan biaya yang pastinya tidak sedikit. Terlebih lagi penelitian ini membahas mengenai Program BOS, tentu saja sumber daya finansial merupakan hal yang sangat krusial.

Namun ternyata, kendala yang dihadapi oleh SMP Negeri 3 Semarang dalam hal implementasi Program BOS justru berkaitan dengan dana. Tim Manajemen BOS di SMP Negeri 3 Semarang mengalami kendala dalam hal pemanfaatan sumber daya finansial. Pihak SMP Negeri 3 Semarang merasa bahwa penggunaan dana yang diberikan tidak dapat digunakan secara maksimal karena terhalang oleh aturan-aturan yang tercantum dalam JUKNIS BOS. Hal tersebut sangat disayangkan karena beberapa kurikulum atau mata pelajaran bisa diterapkan lebih baik kepada siswa melalui metode pembelajaran yang lain,





DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

misalnya melalui kegiatan studi budaya ke kota lain atau kegiatan lingkungan pedesaan. Namun kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena untuk menutupi biaya yang dibutuhkan tidak boleh menggunakan dana BOS, sedangkan pihak sekolah juga dilarang untuk menarik pungutan atau iuran dari orang tua, sehingga kegiatan belajar mengajar melalui kunjungan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Begitu pula untuk pengadaan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah rusak di sekolah, biaya-biaya tersebut tidak bisa ditutupi dengan dana BOS.

Selain itu, pihak sekolah juga merasa bahwa besaran atau presentase dana perolehan BOS tidak bisa disamakan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Hal ini merujuk pada pendapat informan bahwa setiap sekolah memiliki kebutuhannya masing-masing, terlebih

SMP Negeri 3 Semarang adalah sekolah yang unggul dalam bidang akademik.

Adanya JUKNIS BOS memang sangat diperlukan agar seluruh penggunaan dana BOS jadi dapat lebih mudah dikontrol, namun ternyata adanya JUKNIS BOS juga dirasa menghalangi pihak sekolah dalam hal memanfaatkan dana BOS yang tersedia. Tim Manajemen BOS sekolah merasa bahwa ada banyak komponen yang seharusnya bisa dibiayai dengan dana BOS, namun karena tidak tercantum dalam JUKNIS BOS mengakibatkan sekolah tidak dapat mengalokasikan dananya untuk menutupi biaya-biaya yang dibutuhkan tersebut. Pembatasan-pembatasan ini sangat terkait dengan indikator penggunaan dana.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

program BOS di SMP Negeri 3 Semarang sudah cukup baik. Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dilihat dari beberapa aspek antara lain, penyaluran dana BOS, penggunaan dana BOS, larangan penggunaan dana, mekanisme pemberian barang dan jasa, pencatatan barang inventaris, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan stuktur birokrasi.

Pengelolaan dana BOS sudah cukup baik dilihat dari laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang yang sudah dilakukan secara berkala dan rutin setiap triwulan serta transparansi penggunaan dana BOS sudah dilakukan dengan memasang papan pengumuman di area sekolah.

Pencapaian tujuan BOS di SMP Negeri 3 Semarang juga sudah bisa dikatakan tercapai dengan melihat kondisi bahwa sekolah sudah tidak lagi melakukan

pungutan atau iuran dalam bentuk apapun kepada siswa sehingga seluruh biaya operasional sekolah sudah tidak lagi membebankan siswa terutama siswa miskin.

Adapun kendala di beberapa aspek tertentu yaitu, Penggunaan dana BOS belum bisa dilakukan secara maksimal seperti ada beberapa komponen pembiayaan yang seharusnya bisa ditutupi dengan dana BOS namun tidak bisa dilakukan karena adanya keterbatasan dalam pemanfaatan dana BOS. Selain itu, pihak SMP Negeri 3 Semarang juga merasa besaran dana yang diterima tidak bisa disamaratakan dengan sekolah lain dengan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian dari aspek komunikasi, komunikasi yang terjalin antar pelaksana secara rutin dilakukan baik melalui sosialisasi ataupun melalui grup yang ada. Tetapi komunikasi juga menjadi suatu



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

hambatan karena menyebabkan terjadinya mispersepsi yang dialami peksana BOS mengenai aturan-aturan dalam hal penggunaan dana BOS.

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka beberapa saran yang bisa penulis berikan yaitu sebaiknya para pelaksana memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan jelas mengenai aturan-aturan terkait dengan penggunaan dana BOS. Perlu adanya komunikasi 2 arah yang rutin mengenai penggunaan dana BOS sehingga pelaksana bisa menyampaikan dan menanyakan hal-hal apa saja yang dirasa kurang jelas. Pendanaan BOS juga perlu dilihat dari kebutuhandan kondisi sekolah yang berbeda-beda, sehingga dalam pembatasan penggunaan dana tidak bisa disama ratakan dengan sekolah lain. Tiap sekolah seharusnya diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana BOS yang

diterima, selama dana yang digunakan adalah untuk kegiatan belajar mengajar dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah.



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 2008. Penerbit Alfabeta: Bandung.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. 2011. Penerbit Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. 2009. Gava Media: Yogyakarta.

Kusumanegara, Solahudin. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. 2010. Gava Media: Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2007. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.

Nawawi, Ismail. *Public Policy*. 2009. Penerbit PMN: Surabaya.

Nugroho, Riant. *Public Policy*. 2009. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. 2008. Penerbit Alfabeta: Bandung.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. 2012. Gava Media: Yogyakarta.

Siswoyo, Dwi. (2008). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. 2010. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sugandi, Yogi Suprayogi. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di*

*Indonesia*. 2011. Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. 2009. Alfabeta: Bandung.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. 2008. Penerbit MedPress.

INTERNET

Portal BOS Online Kota Semarang  
<http://disdik.semarangkota.go.id/bosonline/>

Portal organisasi anti korupsi (Indonesia Corruption Watch)  
<http://www.antikorupsi.org/id/content/skandal-dana-bos>

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks\\_Pembangunan\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia).

Data Pencarian Dana BOS Kota Semarang tahun 2015. Website Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.  
<http://www.jip.pdkjateng.go.id/-BERITA/2015/BOS/151015/33.pdf>